

PERAN SEKOLAH SEBAGAI PELAKSANA KEADILAN SOSIAL: TINJAUAN PENGAWASAN DAN DISTRIBUSI MAKANAN BERGIZI GRATIS (MBG) DALAM PERSPEKTIF NILAI PANCASILA DAN TATA BOGA

Citra Aprilia Tri Lestari¹, Muhammad Alwi Nasyuha², Najmi Aghnati Yuana³, Siti Sarah Puspaningtias⁴, Syahira Hanin Hanifa⁵, Viglia Yola Rengo Jawa⁶, Ratna Fitria⁷

citraaprilia.01@student.upi.edu¹, alwinasyuha718@student.upi.edu²,
najmiaghnati@student.upi.edu³, sarawrrr@student.upi.edu⁴, syahirahanin@student.upi.edu⁵,
vigliayola22@student.upi.edu⁶, ratna_fitria@upi.edu⁷

Universitas Pendidikan Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis peran sekolah sebagai pelaksana keadilan sosial dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) ditinjau dari perspektif nilai Pancasila dan tata boga. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif longitudinal dengan teknik wawancara semi-terstruktur terhadap Kepala Sekolah MI Layyina pada semester 1 dan semester 2 tahun ajaran berjalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan MBG mengalami perkembangan signifikan setelah pergantian vendor dan penguatan sistem pengawasan. Perbaikan terlihat pada kualitas makanan, pemerataan distribusi, serta respons evaluasi harian. Sekolah juga menerapkan pembagian porsi berdasarkan jenjang usia sebagai bentuk keadilan distributif. Namun, masih ditemukan kendala berupa keterlambatan distribusi, keterbatasan anggaran, menu yang kurang sesuai dengan preferensi siswa, serta belum tersedianya menu khusus bagi siswa dengan alergi makanan. Penelitian ini menegaskan bahwa sekolah memiliki peran penting dalam pengawasan kualitas pangan dan implementasi keadilan sosial melalui program MBG.

Kata Kunci: Makanan Bergizi Gratis, Keadilan Sosial, Pancasila, Tata Boga, Sekolah.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of schools as implementers of social justice in the Free Nutritious Meals (MBG) program from the perspectives of Pancasila values and culinary arts. The study employed a descriptive qualitative longitudinal approach using semi-structured interviews with the principal of MI Layyina during the first and second semesters of the current academic year. The results indicate that the implementation of the MBG program showed significant improvement following a change in vendors and the strengthening of the monitoring system. Improvements were observed in food quality, equitable distribution, and daily evaluation responses. The school also implemented portion allocation based on age groups as a form of distributive justice. However, challenges remain, including distribution delays, budget constraints, menus that do not align with student preferences, and the lack of special menus for students with food allergies. This study underscores that schools play a crucial role in monitoring food quality and implementing social justice through the Free Nutritious Meals (MBG) program.

Keywords: Free Nutritious Meals, Social Justice, Pancasila, Food Service, School.

PENDAHULUAN

Pemenuhan kebutuhan gizi anak usia sekolah merupakan salah satu investasi strategis dalam pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Gizi yang cukup dan seimbang terbukti berpengaruh langsung terhadap kemampuan kognitif, konsentrasi belajar, daya tahan tubuh, serta capaian akademik siswa (Qomarrullah et al., 2025). Namun demikian, kondisi gizi anak sekolah di Indonesia hingga kini masih memprihatinkan. Data Kementerian Kesehatan mencatat angka stunting nasional pada tahun 2024 masih berada di angka 14%, sementara sekitar 41% siswa dilaporkan mengalami kekurangan asupan makan yang berdampak pada menurunnya kualitas belajar mereka di sekolah (Merlinda & Yusuf, 2025). Berangkat dari keprihatinan tersebut, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto meluncurkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program unggulan nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp71 triliun dalam RAPBN 2025, menasar peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA, ibu hamil, serta balita di seluruh Indonesia (Jurnal Bisnis Net, 2025). Program ini tidak hanya ditujukan untuk mengatasi persoalan kekurangan gizi, tetapi juga sebagai strategi jangka panjang dalam mencetak generasi emas Indonesia menuju tahun 2045.

Secara ideologis, program MBG merupakan perwujudan konkret dari sila kelima Pancasila, yakni “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia.” Sila ini mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan akses yang setara terhadap layanan dasar, termasuk pemenuhan hak atas pangan bergizi tanpa memandang latar belakang ekonomi maupun wilayah tempat tinggal (Putra et al., 2024). Dalam konteks pendidikan, keadilan sosial berarti setiap siswa, baik yang berada di pusat kota maupun di daerah terpencil, memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal didukung oleh asupan gizi yang layak. Konsep keadilan ini sejalan dengan pemikiran John Rawls yang menekankan bahwa keadilan sejati mensyaratkan adanya distribusi manfaat yang berpihak kepada kelompok paling rentan, serta pandangan Amartya Sen yang menempatkan pemenuhan kapabilitas dasar manusia sebagai inti dari keadilan sosial (Intelektual, 2025). Dengan demikian, pelaksanaan MBG yang merata, konsisten, dan berkualitas bukan sekadar urusan teknis administratif, melainkan merupakan kewajiban moral negara dalam mewujudkan cita-cita keadilan sosial yang diamanatkan Pancasila.

Dalam struktur pelaksanaan MBG, sekolah menempati posisi yang paling strategis sebagai pelaksana langsung di tingkat operasional. Sekolah bertanggung jawab atas seluruh proses distribusi, mulai dari penerimaan paket makanan dari penyedia katering, pengecekan kesesuaian jumlah dan jenis menu, hingga memastikan setiap siswa mendapatkan haknya tanpa terkecuali (IPSSJ, 2025). Di sinilah perspektif tata boga menjadi sangat relevan. Tata boga sebagai ilmu yang mengatur standar pengolahan, penyajian, dan keamanan pangan menyediakan kerangka ilmiah untuk menilai apakah makanan yang didistribusikan telah memenuhi kaidah higiene dan sanitasi, kesesuaian komposisi gizi dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian, serta kelayakan teknik penyimpanan dan penyajian makanan dalam skala massal di lingkungan sekolah (Nugroho, 2022). Penerapan prinsip higiene dan sanitasi yang ketat sangat krusial mengingat makanan yang terkontaminasi akibat kelalaian dalam proses produksi atau distribusi dapat menimbulkan risiko keracunan yang membahayakan kesehatan siswa.

Meskipun tujuan program MBG sangat mulia, pelaksanaannya di lapangan masih

menghadapi berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Beberapa kajian mencatat adanya distribusi makanan yang tidak tepat waktu, ketidaksesuaian menu dengan standar gizi seimbang, hingga insiden keracunan makanan yang terjadi di beberapa daerah akibat lemahnya pengawasan higiene dan sanitasi pada rantai distribusi (JPIM, 2025). Tanpa koordinasi antar lembaga dan pengawasan yang ketat dari pihak sekolah, program ini rawan menghadapi tantangan berupa pemborosan, penyelewengan anggaran, atau penyediaan makanan yang tidak sesuai standar gizi (Arus AJSH, 2025). Di sisi lain, kajian ilmiah yang secara khusus membahas peran sekolah dalam pengawasan MBG dari perspektif nilai Pancasila dan tata boga secara terintegrasi masih sangat terbatas. Kesenjangan kajian inilah yang menjadi landasan pentingnya penelitian ini dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran sekolah sebagai pelaksana keadilan sosial dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan fokus pada aspek pengawasan dan distribusi makanan bergizi di lingkungan sekolah. Secara spesifik, penelitian ini meninjau pelaksanaan MBG dari perspektif nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kelima sebagai landasan keadilan sosial, serta perspektif tata boga dengan penekanan pada aspek higiene, sanitasi, dan kualitas gizi makanan yang diterima peserta didik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai sejauh mana pelaksanaan MBG di sekolah telah sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan standar kualitas pangan, sekaligus menghasilkan rekomendasi praktis bagi pemangku kebijakan, pengelola sekolah, dan penyedia layanan gizi dalam mengoptimalkan program MBG sebagai wujud nyata komitmen negara terhadap hak gizi seluruh peserta didik Indonesia.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menganalisis secara mendalam peran sekolah sebagai pelaksana keadilan sosial dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Sifat penelitian ini adalah kualitatif longitudinal, di mana data hasil Transkrip Wawancara I pada Semester 1 dan Transkrip Wawancara II pada Semester 2 tahun ajaran berjalan. Lokasi penelitian dilakukan di Madrasah Ibtidaiyah Layyina yang beralamat di Jalan Kihapit Barat Kaler No.125, Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat. Informan dalam penelitian ini bersifat tunggal, yaitu Kepala Sekolah MI Layyina, Ibu Susanti, S.T., M.Pd., yang bertindak sebagai informan kunci karena kedudukannya yang bertanggung jawab penuh atas kebijakan umum, manajemen, anggaran, dan evaluasi program di tingkat satuan pendidikan.

Teknik pengambilan data dalam penelitian ini berdasar sepenuhnya pada wawancara mendalam secara semi-terstruktur bersama Ibu Susanti, S.T., M.Pd.. Wawancara difokuskan secara prosedural untuk mengeksplorasi perspektif kepala sekolah mengenai regulasi perencanaan menu gizi, tantangan distribusi logistik dari pihak penyedia jasa, mekanisme kontrol kualitas boga, serta refleksi keadilan sosial Pancasila dalam operasional sekolah. Seluruh informasi utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang dibantu dengan instrumen pendukung berupa pedoman wawancara semi-terstruktur yang berisi poin pertanyaan terarah terkait aspek tata kelola dan nilai Pancasila, serta catatan lapangan.

Analisis data dilakukan secara deskriptif menggunakan model interaktif Miles dan

Huberman yang meliputi tiga alur kegiatan, yaitu penyederhanaan data hasil wawancara, penyajian data secara naratif, penarikan kesimpulan. Langkah analisis ini penting untuk menjamin bahwa seluruh data lisan dari Ibu Susanti disusun dan ditafsirkan secara sistematis agar dapat ditarik kesimpulan ilmiah yang objektif. Untuk menguji kebenaran data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dengan menyilang-uji konsistensi keterangan Ibu Susanti, S.T., M.Pd. pada berbagai dimensi bahasan wawancara lintas semester. Selain itu, dilakukan triangulasi teknik dengan memverifikasi kesesuaian data lisan hasil wawancara terhadap regulasi kebijakan publik resmi yang berlaku, serta prosedur konfirmasi ulang secara formal dengan menyerahkan kembali draf transkrip wawancara kepada Ibu Susanti, S.T., M.Pd. untuk dikonfirmasi kesesuaiannya guna menghindari bias subjektivitas peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah, program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di MI Layyina mulai dilaksanakan pada awal November 2025 dengan jumlah penerima sebanyak 215 siswa. Program ini bekerja sama dengan penyedia makanan dari luar sekolah, yaitu katering Setiamanah. Dalam pelaksanaan sehari-hari, pengawasan dilakukan oleh beberapa guru yang ditunjuk sebagai koordinator pangan.

Gambaran Umum Pelaksanaan Program MBG

Pelaksanaan MBG dilakukan rutin pada jam sekolah dengan sistem distribusi makanan ke setiap kelas. Pada awal pelaksanaan semester 1, program masih mengalami banyak kendala, terutama terkait kualitas makanan dan ketepatan ditemukan dalam kondisi cepat basi karena keterlambatan distribusi.

Memasuki semester 2, terjadi perubahan besar pada pengelolaan program, terutama pergantian vendor dapur. Pihak sekolah menilai penyediaan baru lebih profesional, bertanggung jawab, dan mampu meningkatkan kualitas makanan dibandingkan vendor sebelumnya.

Alur Distribusi dan Pengawasan

Makanan dikirim dari pihak katering ke sekolah, kemudian didistribusikan kepada siswa oleh guru kelas secara bersamaan. Pengawasan kualitas dilakukan secara organoleptik melalui pemeriksaan tampilan, aroma, dan tekstur makanan untuk memastikan kelayakan konsumsi siswa.

Dalam pelaksanaannya sekolah juga melakukan evaluasi harian terhadap program MBG. Jika terdapat keluhan dari siswa atau guru, pihak sekolah langsung melakukan tindak lanjut pada hari yang sama. Sistem evaluasi ini dinilai cukup efektif karena permasalahan dapat segera ditangani.

Pemerataan Pembagian Makanan

Pada awal program, pemerataan distribusi belum berjalan secara sistematis. Namun, sekolah kemudian menerapkan sistem penomoran dan pembagian porsi berdasarkan jenjang kelas. Siswa kelas rendah memperoleh porsi lebih kecil dibandingkan siswa kelas tinggi agar pembagian lebih sesuai kebutuhan usia.

Saat ini, pihak sekolah menilai pemerataan distribusi sudah jauh lebih baik dibandingkan semester awal karena prosedur pembagian mulai berjalan lebih tertib dan konsisten. Meskipun demikian belum mendapatkan menu pengganti khusus.

Pengawasan Kualitas Makanan

Pengawasan kualitas makanan dilakukan oleh seluruh guru kelas. Jika ditemukan makanan yang terlihat basi, kurang matang, atau mencurigakan, makanan tersebut tidak diberikan kepada siswa. Pada semester awal, kasus makanan basi dan kualitas makanan yang buruk cukup sering terjadi sehingga banyak makanan terbuang.

Sebagai tindak lanjut, sekolah melakukan pergantian vendor dapur dan memperketat pengawasan. Setelah perubahan tersebut, Perubahan vendor pada semester 2 menunjukkan pengaruh terhadap peningkatan kualitas makanan, baik dari segi variasi menu maupun kesesuaian prinsip gizi. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas penyedia makanan menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi MBG. Selain itu, kesadaran siswa dalam mengecek kelayakan makanan juga meningkat.

Kendala yang Dihadapi

Meskipun terdapat perbaikan, beberapa kendala masih terus muncul. Kendala utama adalah keterlambatan distribusi makanan akibat penyesuaian rute logistik penyedia. Selain itu, menu makanan dinilai masih kurang sesuai dengan selera anak-anak sehingga beberapa siswa kurang tertarik mengkonsumsi makanan yang diberikan.

Kendala lain terdapat pada aspek anggaran. Pihak sekolah menilai adanya ketidaksesuaian antara anggaran pemerintah dengan biaya operasional riil di lapangan, sehingga mempengaruhi kualitas bahan makanan.

Perubahan Semester 1 ke Semester 2

Berdasarkan data longitudinal, terdapat beberapa perubahan penting antara semester 1 dan semester 2. Pada semester awal, program masih menghadapi banyak masalah seperti kualitas makanan buruk, makanan cepat basi, pengawasan kurang efektif, dan sistem pemerataan yang belum konsisten.

Memasuki semester 2, beberapa aspek mengalami perbaikan, antara lain:

1. kualitas makanan lebih baik dan lebih variatif,
2. sistem pemerataan distribusi lebih tertib,
3. pengawasan lebih responsif,
4. pergantian vendor meningkatkan profesionalitas pengelolaan program.

Namun, masih terdapat beberapa masalah yang belum terselesaikan, yaitu:

1. keterlambatan distribusi makanan,
2. menu yang kurang diminati siswa,
3. belum adanya menu khusus bagi siswa alergi,
4. serta beban tambahan bagi guru dalam operasional program MBG.

Secara keseluruhan, pelaksanaan Program MBG di MI Layyina menunjukkan perkembangan yang cukup baik dibandingkan awal pelaksanaan. Akan tetapi, program ini masih memerlukan perbaikan terutama pada sistem distribusi, kualitas menu, dan penyesuaian kebutuhan gizi siswa agar tujuan pemerataan dan keadilan sosial dapat tercapai secara optimal.

Pembahasan

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah MI Layyina, Ibu Susanti, S.T., M.Pd., program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah ini ternyata tidak berjalan semulus yang dibayangkan. Program dimulai pada awal November 2025 dengan 215 siswa sebagai penerima manfaat. Namun yang cukup mengejutkan, dalam satu minggu

terakhir sebelum wawancara dilakukan, program ini sempat berhenti sementara karena masalah dana dapur. Ini menjadi sinyal awal bahwa program MBG masih sangat rentan terhadap ketidakpastian anggaran.

Distribusi dan Pembagian Porsi

Untuk penyediaan makanan, sekolah bekerja sama dengan Katering Setiamanah dari luar sekolah. Pengawasan hariannya diserahkan kepada beberapa guru yang ditunjuk sebagai koordinator. Soal porsi, sekolah tidak membagi sama rata siswa kelas 1-3 mendapat porsi lebih kecil, sementara kelas 4-6 mendapat porsi lebih besar. Alasannya masuk akal: kebutuhan kalori anak kelas tinggi tentu berbeda dengan kelas rendah. Pendekatan ini sebenarnya sudah sejalan dengan prinsip keadilan yang sesungguhnya, yaitu memberi sesuai kebutuhan, bukan asal sama rata (Desiani & Syafiq, 2025).

Sayangnya, masalah justru datang dari sisi pengiriman. Jadwal kedatangan makanan tidak konsisten kadang terlalu cepat, kadang terlambat. Pernah terjadi makanan datang pukul 08.00 pagi, tapi saat jam makan siang pukul 12.00 makanannya sudah basi. Di sisi lain, keterbatasan anggaran juga membuat kualitas bahan baku tidak bisa dijaga dengan baik. Padahal dari segi rasa sebenarnya cukup baik, hanya saja bahan yang digunakan mudah rusak karena anggarannya terbatas. Dalam dunia tata boga, ketepatan waktu distribusi bukan hal sepele makanan matang punya batas waktu aman konsumsi yang tidak bisa diabaikan (Desiani & Syafiq, 2025).

Pengawasan Kualitas Makanan

Karena kegiatan makan berlangsung serentak di semua kelas, seluruh guru kelas ikut dilibatkan dalam pengecekan kualitas makanan. Setiap kali makanan datang, guru langsung memeriksa tiga hal: tampilan, aroma, dan tekstur. Kalau ada yang terlihat mencurigakan misalnya basi atau berbau aneh makanan itu langsung tidak dibagikan. Siswa pun diminta aktif melapor kalau menemukan makanan yang rasanya tidak beres saat dimakan.

Kepala sekolah juga sudah memberikan pengarahan kepada para guru soal standar kebersihan dan kelayakan makanan. Guru bertugas mengecek jumlah sekaligus kualitas makanan yang datang, termasuk menangani sisa makanan. Menariknya, ada kesepakatan antara pihak MBG dan orang tua bahwa sisa makanan yang masih layak boleh dikonsumsi oleh guru, petugas kebersihan, atau warga sekitar. Kebijakan ini sederhana tapi mencerminkan kepedulian sosial dan prinsip tidak mubazir yang patut diapresiasi.

Keadilan Sosial dalam Perspektif Pancasila

Salah satu hal yang paling menarik sekaligus memprihatinkan dari wawancara ini adalah pengakuan langsung kepala sekolah bahwa program MBG belum benar-benar mencerminkan nilai Keadilan Sosial dalam sila kelima Pancasila. Masalahnya ada pada siswa yang punya alergi atau pantangan makanan tertentu.

Sekolah sebenarnya sudah punya data siswa dengan kondisi khusus tersebut. Tapi pihak penyelenggara MBG tidak menyesuaikan menu untuk mereka. Solusi yang diambil pun masih bersifat seadanya: orang tua diberitahu agar anaknya tidak makan makanan MBG tertentu. Akibatnya, siswa-siswa ini tidak benar-benar menikmati manfaat program, padahal secara resmi mereka terdaftar sebagai penerima. Ini jelas bertentangan dengan semangat keadilan sosial yang seharusnya memastikan setiap anak mendapat hak yang sama (Aditya, 2024). Seperti yang disampaikan kepala sekolah, memberi makanan yang sama kepada semua siswa tanpa mempertimbangkan kondisi masing-masing bukan berarti

adil (Hasibuan, 2024).

Kendala Anggaran dan Menu

Masalah lain yang tidak kalah penting adalah soal anggaran. Kepala sekolah menyebut ada ketimpangan antara anggaran yang ditetapkan pemerintah dengan biaya nyata di lapangan. Akibatnya kualitas bahan makanan jadi ikut terkorbankan. Selain itu, menu yang disajikan dinilai kurang cocok dengan selera anak SD, sehingga banyak siswa yang tidak tertarik menghabiskan makanannya.

Kepala sekolah punya beberapa harapan konkret untuk kedepannya: jadwal menu diinformasikan lebih awal supaya bisa diantisipasi, perencanaan tidak mendadak, menu lebih ramah anak tapi tetap bergizi, dan soal porsi lebih baik sedikit tapi benar-benar layak daripada banyak ragam tapi kualitasnya sangat minim. Ada juga ide menarik dari kepala sekolah soal penggunaan saus buatan sendiri yang lebih sehat, sebagai cara membuat makanan lebih disukai anak-anak tanpa mengorbankan nilai gizinya (Rahmah et al., 2025).

Beban Tambahan bagi Guru

Satu hal yang sering tidak masuk dalam radar evaluasi program MBG adalah beban tambahan yang harus ditanggung guru. Selain mengajar, mereka kini harus periksa kualitas makanan, awasi distribusi di kelas, tanggap keluhan siswa, dan urus sisa makanan semua itu tanpa ada penyesuaian formal pada beban tugas mereka.

Ini menjadi catatan serius. Program sebesar MBG tidak bisa hanya mengandalkan sekolah sebagai pelaksana teknis di lapangan. Penyelenggara perlu lebih aktif memastikan distribusi berjalan lancar dan kualitas makanan terjaga, sehingga guru bisa fokus pada tugas utamanya: mendidik (Tambunan et al., 2025).

Perkembangan Pelaksanaan Program

Kondisi pelaksanaan program MBG saat ini dinilai jauh lebih baik dibandingkan dengan masa awal pelaksanaannya. Indikator utama dari peningkatan ini adalah pergantian pihak penyedia makanan (vendor dapur) melalui implementasi kebijakan pemerataan, yang dinilai membawa dampak positif terhadap kualitas pengelolaan karena dikelola oleh pihak yang lebih kompeten, bertanggung jawab, dan profesional. Meskipun demikian, masih ditemukan kendala dari sisi manajemen distribusi, khususnya terkait ketepatan waktu pengiriman. Keterlambatan ini sering kali terjadi karena pihak penyedia logistik harus menyesuaikan rute pengiriman dengan sekolah-sekolah terdekat lainnya. Di sisi lain, jumlah siswa sebagai penerima manfaat justru mengalami penurunan. Hal ini merupakan imbas dari evaluasi kendala pada semester awal, di mana sejumlah orang tua siswa secara sadar memilih untuk tidak mengizinkan anaknya menerima pasokan makanan dari program MBG.

Implementasi Keadilan Sosial (Sila ke-5 Pancasila)

Pada awal peluncuran program, prosedur pemerataan distribusi belum berjalan secara sistematis. Namun, dalam dua bulan terakhir, kebijakan ini telah konsisten diimplementasikan secara ketat, didukung oleh sistem penomoran yang diikuti secara tertib oleh seluruh pihak.

Sebagai bentuk manifestasi keadilan sosial yang nyata di lapangan, sekolah menerapkan kebijakan distribusi alternatif. Makanan yang tidak termakan oleh siswa namun masih sangat layak konsumsi dialokasikan kepada pihak lain yang membutuhkan di lingkungan sekitar, seperti petugas keamanan (satpam) dan tetangga sekolah. Meskipun

secara administratif program ini dinilai merata karena seluruh siswa mendapatkan porsi (Adil Secara Konsep), secara praktik hal ini dirasa masih kurang sepadan (*not worth it*). Terdapat kesenjangan antara besarnya anggaran yang dikeluarkan pemerintah dengan kualitas menu dan harga riil yang diterima. Selain itu, program ini belum dapat diserap secara optimal oleh seluruh siswa akibat kendala selera dan kelayakan variasi menu.

Kontrol Kualitas dan Tata Boga

Permasalahan kualitas makanan menjadi salah satu evaluasi paling krusial. Pada awal program, kualitas makanan yang buruk membuat hidangan tidak layak dikonsumsi dan memicu banyak makanan terbuang sia-sia. Kasus makanan basi, kurang matang, atau terkontaminasi sangat marak terjadi pada masa pembagian oleh vendor generasi pertama. Sebagai tindakan darurat (*emergency response*) untuk melindungi kesehatan siswa, sekolah melarang konsumsi makanan tersebut dan mengalihkannya menjadi pakan ikan. Makanan tak layak ini juga diolah kembali menjadi pakan ternak dan pupuk organik oleh pihak profesional. Setelah sekolah melakukan tindakan tegas berupa pemutusan hubungan kerja dengan vendor lama, kualitas makanan saat ini dinilai jauh lebih konsisten, variatif, dan memiliki kesesuaian gizi yang lebih baik.

Dari sisi pengawasan internal, indikator formal seperti pengecekan suhu dinilai kurang efektif dan tidak konsisten, sehingga sekolah sempat kecolongan mendapati makanan tak layak di tangan siswa. Hal ini mendorong peningkatan kesadaran siswa yang kini lebih antisipatif dan mandiri dalam mengecek kelayakan makanan secara organoleptik, yakni melalui aroma dan rasa, sebelum mengkonsumsinya. Meskipun variasi menu saat ini menjadi aspek yang paling membaik, komposisi cita rasanya dinilai masih kurang ramah anak (*less kids-friendly*).

Jika ya: 1) Kapan terjadi kejadian terakhirnya?; 2) Bagaimana penanganannya?; 3) Apakah prosedurnya berubah setelah itu?

Indikator Masalah	Uraian dan Realisasi Lapangan
Status Kasus	Ya, kasus makanan basi, kurang matang, atau terkontaminasi dulu sangat sering terjadi.
Waktu Kejadian Terakhir	Kejadian terakhir kali marak terjadi pada masa pembagian MBG oleh pihak penyedia/dapur generasi pertama.
Tindakan Penanganan	Makanan yang tidak layak tersebut dialihkan kepada pihak profesional untuk diolah kembali menjadi pakan ternak dan pupuk organik.
Perubahan Prosedur	Ya, prosedur berubah total. Sekolah mengambil tindakan tegas dengan melakukan pemutusan hubungan kerja dan mengganti vendor dapur dengan penyedia baru yang mematuhi sistem pemerataan.

Sistem Pengawasan dan Evaluasi

Sistem tata kelola (*governance*) program MBG di sekolah juga mengalami penyesuaian. Terdapat pergantian signifikan pada posisi penanggung jawab program

karena penanggung jawab sebelumnya dinilai tidak efektif dan lambat dalam melaporkan permasalahan lapangan. Sekolah kini menerapkan evaluasi harian yang dinilai cukup efektif, responsif, dan langsung menindaklanjuti keluhan dari guru maupun siswa pada hari yang sama. Kendati demikian, kelemahan terbesar yang masih dihadapi adalah kesenjangan finansial antara alokasi anggaran (*budgeting*) pemerintah dengan realisasi biaya operasional riil di lapangan. Di tingkat sekolah, operasional teknis yang menyita waktu ini turut berdampak pada berkurangnya waktu istirahat guru dan mereduksi efektifitas waktu mengajar yang seharusnya didedikasikan untuk kegiatan akademik.

Refleksi dan Rekomendasi

Guna memperbaiki sistem MBG yang selaras dengan prinsip gizi dan keadilan sosial, orientasi pengembangan menu menjadi hal krusial yang perlu diubah. Kuantitas variasi menu disarankan agar sedikit dikurangi atau disederhanakan, dengan syarat memiliki cita rasa yang menarik minat anak agar dapat dikonsumsi habis tanpa sisa. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan agar dilakukan survei preferensi menu anak secara berkala mengingat perbedaan karakteristik selera kuliner di setiap daerah. Selain itu, perancangan menu harus melibatkan ahli gizi profesional secara riil di lapangan, bukan sekadar menjadikannya sebagai pemenuhan dokumen administratif formalitas belaka. Dari segi tata kelola sumber daya manusia, pemerintah diharapkan dapat mengalokasikan staf eksternal khusus untuk mengelola operasional MBG di sekolah agar tidak membebani tugas pokok pendidik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) di MI Layyina menunjukkan adanya upaya sekolah dalam mewujudkan nilai keadilan sosial melalui pemerataan distribusi makanan dan pengawasan kualitas pangan di lingkungan sekolah. Program ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan pihak katering eksternal dan melibatkan guru sebagai pengawas distribusi sekaligus penanggung jawab evaluasi harian. Sekolah telah menerapkan sistem pembagian porsi berdasarkan jenjang usia siswa sebagai bentuk penyesuaian kebutuhan, sehingga konsep pemerataan tidak dimaknai sebagai kesamaan mutlak, melainkan pemberian sesuai kebutuhan peserta didik.

Pada awal pelaksanaan semester 1, program MBG masih menghadapi berbagai kendala, seperti kualitas makanan yang buruk, makanan cepat basi akibat keterlambatan distribusi, pengawasan yang belum optimal, serta sistem pemerataan yang belum berjalan secara konsisten. Selain itu, program belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan sosial karena siswa dengan alergi atau pantangan makanan belum memperoleh menu alternatif yang sesuai dengan kebutuhannya. Kendala lain juga ditemukan pada aspek anggaran, ketepatan distribusi, serta menu yang kurang sesuai dengan preferensi anak-anak.

Memasuki semester 2, terjadi beberapa perubahan signifikan, terutama setelah pergantian vendor penyedia makanan dan penyesuaian sistem pengawasan. Kualitas makanan dinilai lebih baik, variasi menu meningkat, sistem distribusi menjadi lebih tertib, serta evaluasi harian berjalan lebih responsif terhadap keluhan siswa maupun guru. Meskipun demikian, beberapa permasalahan masih ditemukan, seperti keterlambatan distribusi, belum tersedianya menu khusus bagi siswa berkebutuhan pangan tertentu, serta bertambahnya beban operasional guru dalam pelaksanaan program MBG.

Secara keseluruhan, Program MBG di MI Layyina telah menunjukkan perkembangan yang cukup positif sebagai bentuk implementasi nilai keadilan sosial di lingkungan sekolah. Namun, optimalisasi program masih diperlukan, khususnya pada aspek kualitas layanan pangan, ketepatan distribusi, penyesuaian menu dengan kebutuhan siswa, serta penguatan sistem pengelolaan agar tujuan pemerataan dan pemenuhan hak peserta didik dapat tercapai secara lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rozak, Armiya Nur Lailatul Izzah, Cahya Amalia Chusna, Program Studi S1 PGSD Universitas Alma Ata. (2025). Pengaruh MBG (Makan Bergizi Gratis) terhadap Minat Belajar Siswa. Diakses dari <https://pgsd.almaata.ac.id/index.php/2025/12/03/pengaruh-mbg-makan-bergizi-gratis-terhadap-minat-belajar-siswa/>
- Aditya, F. (2024). Konsep keadilan sosial dalam Pancasila: Implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 1(4), 123–126. Diakses dari <https://jurnalisticomah.org/index.php/jppi/article/view/1423>
- Desiani, L., & Syafiq, M. (2025). Standar gizi dan implementasi program Makan Bergizi Gratis. *Jurnal Nutrisi dan Kesehatan*, 12(1), 23–35. <https://jurnal-id.com/index.php/jupin/article/view/2364>
- Desiani, N., & Syafiq, A. (2025). Efektivitas program makan gratis pada status gizi siswa sekolah dasar: Tinjauan sistematis. *Malahayati Nursing Journal*, 7(1), 27–48. Diakses dari <https://ejournalmalahayati.ac.id/index.php/manuju/article/view/17497>
- Hasibuan, M. (2024). Keadilan sosial dalam refleksi Pancasila. *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia (JPPI)*, 1(4), 170–176. Diakses dari <https://jurnalisticomah.org/index.php/jppi/article/view/1449>
- Herdiana, D. (2025). Implementasi kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-faktor pendorong dan penghambat. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2), 470–478 .
- Herdiana, D. (2025). Implementasi Kebijakan Makan Bergizi Gratis (MBG): Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Diakses dari https://www.researchgate.net/profile/Dian-Herdiana/publication/390105596_Implementasi_Kebijakan_Makan_Bergizi_Gratis_MBG_Faktor-faktor_Pendorong_dan_Penghambat/links/67dfe2863ad6d174c4b82709/Implementasi-Kebijakan-Makan-Bergizi-Gratis-MBG-Faktor-faktor-Pendorong-dan-Penghambat.pdf
- Izzul Fatchu Reza (2025). Urgensi Penjaminan Mutu dalam Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. *Jurnal Analisis Kebijakan*. Diakses dari <http://jak.lan.go.id/jurnalpusaka/article/view/771>
- Lubis, M. A., & Alviano, R. (2025). Analisis pengawasan dan pengadaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di institusi pendidikan dasar. *Kebijakan dan Pengembangan Daerah*, 13(1), 45–58.
- Muh. Rama Wijaya, Elva Andriani, Nabila Khusnul Hatima, Julia Julia, Arsita Arsita, Yaman La Ndibo (2026). Dampak Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Terhadap Motivasi dan Prestasi Belajar Siswa. *STRATEGY: Jurnal Inovasi Strategi dan Model Pembelajaran*. Diakses dari <https://jurnalp4i.com/index.php/strategi/article/view/9756>
- Purwanza, S. W., Wardhana, A., Mufidah, A., Renggo, Y. R., Hudang, A. K., Setiawan, J., Darwin, Badi'ah, A., Sayekti, S. P., Fadlilah, M., Nugrohowardhani, R. L. K. R., Amruddin, Saloom, G., Hardiyani, T., Tondok, S. B., Priskusanti, R. D., & Rasinus. (2022). *Metodologi penelitian kuantitatif, kualitatif dan kombinasi* (A. Munandar, Ed.). CV. Media Sains Indonesia. https://books.google.com/books/about/METODOLOGI_PENELITIAN_KUANTITATIF_K

UALIT.html?id=0CjKEAAAQBAJ

- Putra, D. F. B., Fahmi, A., Prasetyo, A., Firmansyah, F., & Ghozali, I. (2024). Pancasila sebagai dasar hukum dalam mewujudkan keadilan sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(5), 233–237 .
- Rahmah, H. A., Anggraini, A., Nilasari, Y. P., & Salsabilla, E. P. (2025). Analisis efektivitas program Makan Bergizi Gratis di sekolah dasar Indonesia tahun 2025. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(2), 2855–2866. Diakses dari <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/view/380>
- Rif'iy Qomarrullah, Suratni Suratni Lestari Wulandari S , Muhammad Sawir. (2025). Dampak Jangka Panjang Program Makan Bergizi Gratis terhadap Kesehatan dan Keberlanjutan Pendidikan. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*. Diakses dari <http://journal.intelekmadani.org/index.php/ijipublication/article/view/660>
- Setiawan, B., & Lestari, P. (2025). Peran sekolah dasar sebagai instrumen distribusi kesejahteraan pangan: Studi evaluasi uji coba Makan Bergizi Gratis. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 3(2), 112–124.
- Tambunan, K. A. H., Nababan, R., Siagian, R. A., Naiborhu, R., Harianti, S., & Jamaludin, J. (2025). Tinjauan kritis tentang program Makan Bergizi Gratis terhadap produktivitas belajar siswa. *Katalis Pendidikan: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Matematika*, 2(2), 21–31. Diakses dari <https://journal.lpkd.or.id/index.php/Katalis/article/view/1428>